

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA 2022



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra..	8
2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD	18
2.3 Isu-Isu penting pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan sasaran Renja	37
3.3 Program dan kegiatan	39
BAB IV PENUTUP	50
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt atas berkah dan rahmatNya sehingga Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 ini, tim penyusun berusaha dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, namun tim penyusun sadar bahwa Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam penyusunan maupun dalam penggunaan bahasa, sehingga kritik dan saran sehubungan dengan penulisan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 ini sangat membantu dalam penyempurnaan.

Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 diharapkan, semoga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan sehingga memberikan arah bagi pembangunan usaha sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jeneponto.

Jeneponto, 26 Maret 2021

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Jeneponto

ARFAN SANRE, SH. MM

NIP. 19690827 199203 1 010

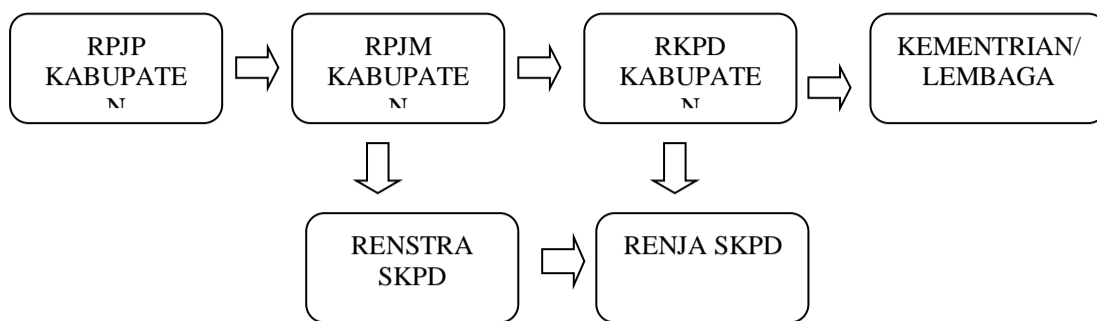
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan diterapkannya Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sekaligus merupakan bagian dari kesatuan sistem Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Proses penyusunan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan disusun dengan melalui beberapa tahapan, yakni: persiapan penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan rencana kerja, pelaksanaan forum SKPD dan penetapan renja. Persiapan penyusunan yang dimaksud meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun renja, orientasi mengenai renja, penyusunan agenda kerja tim penyusun renja dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan renja meliputi: mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra SKPD, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya dilakukan forum SKPD untuk menampung usulan usulan prioritas dari masyarakat. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan RKPD, Renstra RKPD, Renja K/L dan tindak lanjut proses penyusunan APBD dapat dilihat pada bagan dibawah ini



Rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten (RPJP) dijabarkan didalam rencana pembangunan jangka menengah kabupaten (RPJM). Kemudian rencana pembangunan jangka menengah kabupaten dijabarkan kedalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), serta dijabarkan pula oleh Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD guna mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah, didalam mendukung pelaksanaan serta pencapaian Renstra SKPD, maka diperlukan Rencana kerja SKPD yang memuat segala program dan kegiatan yang dilakukan dalam satu tahun dimana program dan kegiatan tersebut tercantum didalam Renstra SKPD, sehingga dengan adanya Rencana kerja SKPD, diharapkan pencapaian target didalam Renstra. Hal lain yang juga dapat membantu dalam proses pencapaian target adalah dengan adanya sinkronisasi program dan kegiatan dengan Kementerian/lembaga terkait.

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 menitik beratkan kepada masalah-masalah yang bersifat aktual antara lain Peningkatan Produksi Nelayan tangkap dan Pembudidaya Ikan, Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat pesisir, Penguatan Kelembagaan dan Penanggulangan Kemiskinan didaerah pesisir.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 32 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimum lingkup kementrian kelautan dan Perikanan
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- o. SE Mendagri No. 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah
- p. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016, tentang Organisasi Perangkat daerah.

Dalam kaitan itu Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto yang mempunyai Tugas dan Fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan

pengabdian masyarakat diharapkan menyusun dokumen perencanaan tahunan untuk Tahun Anggaran 2020.

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan renja SKPD: menyediakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD dan resntra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyusun dan melaksanakan program, kegiatan, menyusun indikator kinerja dan pagu indikatif serta prakiraan maju program/kegiatan berdasarkan RKPD dan tufoksi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Tujuan Penyusunan rencana kerja Organisasi perangkat daerah:

1. Sebagai acuan/arahan bagi stakeholder Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun dan melaksanakan program/kegiatan.
2. Sebagai acuan untuk mengevaluasi dan menetapkan target-target kinerja pembangunan dalam kerangka pencapaian target renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
3. Memberikan arah dan tujuan bagi stakeholder Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pelayanan sesuai tufoksi Dinas Kelautan dan Perikanan.
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja tahunan Dinas kelautan dan Perikanan

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :

- a. Tersusunnya kerangka kegiatan dan penganggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022.
- b. Terumuskannya prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD
- 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 dan tahun sebelumnya juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyusunan kerangka kebijakan dan penyusunan kerangka penganggaran Tahun 2022 terutama dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Berdasarkan renja diatas jika dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2020 ini secara garis besar sudah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun, meskipun masih terdapat beberapa hal ataupun rencana kegiatan yang belum berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, Yakni:

- a. Terbatasnya jumlah anggaran pada tahun 2020, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- b. Adanya Refocusing/Rasionalisasi Anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid 19

Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN
A	PRODUKSI PERIKANAN			
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	17.737,2 Ton	17.058,1 Ton	96,2%
	Jumlah Produksi perikanan Budidaya	21.150,82 Ton	25.194,8 Ton	119%
B	PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN			
	Jumlah Produksi Udang	698,9 Ton	538,98 Ton	77,11%
	Jumlah Produksi Bandeng	2.513,4 Ton	4.229,31 Ton	168,2%
	Jumlah Produksi rumput Laut	17.938,52 Ton	20.629,53 Ton	115,001%
C	KONSUMSI IKAN			
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kap/thn)	40,09 Kg	40,10 Kg	100,2%
D	NILAI TUKAR NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA			
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Rp.101,10	Rp.101,2	100,1%
E	PRODUKSI GARAM			
		29.223 Ton	71.956,32 Ton	246,23%

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
A	KELEMBAGAAN DAN BINA USAHA											
1	Mengeluarkan Izin Usaha Perikanan		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton)	0	0	0	0	0	0	0	0	Perpindahan Tempat Layanan, ke kantor Pelayanan Terpadu
2	Mengeluarkan izin Kapal Perikanan		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton)	0	0	0	0	0	0	0	0	Perpindahan Kewenangan ke Provinsi
B	SEKERTARIAT											
1	Mengeluarkan Rekomendasi			2	2	2	2	1	0	2	2	

Pencapaian Outcome suatu program merupakan suatu hal yang sangat diharapkan, terkait dengan Outcome Program yang telah disusun pada Dinas Kelautan dan Perikanan belum mencapai target Kinerja yang diinginkan sampai dengan tahun berjalan (n-1), Pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 belum terdapat Program yang telah mencapai outcome yang diinginkan, dapat dilihat pada table diatas.

Adapun program yang belum memenuhi target kinerja (outcome) sampai dengan tahun berjalan adalah:

No	Nama Program
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sampai dengan tahun berjalan (n-1), untuk program pada Dinas Kelautan dan Perikanan, belum terdapat program yang melebihi target Kinerja ataupun melebihi outputnya. Dalam proses pencapaian target suatu program kegiatan dibutuhkan beberapa faktor penunjang. Pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan faktor-faktor penyebab sehingga suatu Program/Kegiatan belum mencapai target kinerja yang diharapkan adalah:

- 1) Keterbatasan dari jumlah anggaran yang tersedia, dengan asumsi bahwa dalam proses perencanaan suatu program/kegiatan telah dilakukan perhitungan terhadap semua biaya sehingga target kinerja satu program/kegiatan dapat tercapai, namun terkadang dalam pelaksanaan Program/kegiatan, realisasi anggaran dari perencanaan dengan pelaksanaan terdapat selisih sehingga pencapaian target Kinerja belum dapat dimaksimalkan.
- 2) Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berjalan.
- 3) Adanya Refocusing dan untuk penanggulangan Pandemi Covid 19

- 4) Stabilitas/kesesuaian Harga Barang dan Jasa yang pada umumnya dilaksanakan

Implikasi yang ditimbulkan dari adanya program/kegiatan yang belum mencapai target, jika dikaitkan dengan capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan maka dapat dikatakan bahwa capaian program/kegiatan yang sudah disusun agar dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun akan terhambat atau dapat dikatakan tidak tercapai, sehingga upaya yang harus dilakukan agar pencapaian target program/kegiatan dapat tercapai, salah satunya adalah penyesuaian antara jumlah anggaran program/kegiatan pada saat penyusunan rencana (pagu indikatif) sedapat mungkin dapat disesuaikan dengan anggaran yang disediakan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga pencapaian program/kegiatan dapat tercapai.

Adapun rekomendasi atau kebijakan yang sebaiknya dilakukan terhadap perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja suatu program/kegiatan adalah:

- 1) Peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD), guna peningkatan sumber dana, serta Dinas Kelautan dan Perikanan berusaha mendapatkan sumber dana lain, berupa dana alokasi khusus, dana tugas pembantuan, dana APBD I (anggaran Provinsi) sehingga dengan adanya tambahan sumber pendanaan, maka dapat diasumsikan bahwa penambahan dana tersebut, dapat meningkatkan daya dukung terhadap pencapaian target terhadap suatu program/kegiatan.
- 2) Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan, sehingga capaian program/kegiatan dapat tercapai
- 3) Mengoptimalkan program/kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto, dengan tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, guna sinkronisasi program/kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten.

Tahun anggaran 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 4 Program yang terdiri dari beberapa kegiatan.

Adapun rincian Program serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.469.387.771
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.658.225.000
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.941.835.000
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	27.387.000
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	50.187.000
Total		9.147.021.771

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, dari segi realisasi program juga terdapat banyak kemajuan yang dikarenakan adanya sinkronisasi antara semua pihak terkait dalam menunjang terlaksananya program kerja dan renstra yang telah disusun. Hal ini dapat dilihat dari 4 program kegiatan yang dilakukan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto pada tahun anggaran 2021 melalui APBD Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.147.021.771 dengan rincian:

- A. Belanja tidak langsung sebesar Rp 3.118.764.022,-
 - a) Gaji Pokok PNS : Rp. 2.029.595.120
 - b) Tunjangan Keluarga : Rp. 180.074.476
 - c) Tunjangan Jabatan : Rp. 174.567.750
 - d) Tunjangan Umum : Rp. 65.938.250
 - e) Tunjangan Beras : Rp. 100.656.558
 - f) Tunjangan PPh : Rp. 2.051.333
 - g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN: Rp. 84.006.020
 - h) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN: Rp. 4.175.167

- i) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN: Rp.12.525.501
 - j) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN: Rp.8.698.265
 - k) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN: Rp.770.148.000
- B. Belanja langsung sebesar Rp. 6.028.257.749 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Yakni:
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Rp.1.350.623.749,-
 - b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap: Rp.2.658.225.000
 - c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya: Rp.1.941.835.000
 - d) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan: Rp. 27.387.000
 - e) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan: Rp. 50.187.000

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Kelautan dan Perikanan Jeneponto dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat mengacu kepada Standard Pelayanan Minimum (SPM), melakukan 1 (satu) Pelayanan Jasa Kepada Masyarakat, Yakni:

a. Penerbitan Rekomendasi Kelompok

Pada Tahun 2020, jumlah rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 2 Rekomendasi, bagi kelompok-kelompok perikanan dan pelaku usaha perikanan dengan tidak dipungut biaya.

Pada tahun 2021 ini Dinas Kelautan dan Perikanan hanya melakukan pelayanan terhadap pemberian rekomendasi bagi kelompok Nelayan, Kelompok Pembudidaya, Kelompok Pengolah hasil perikanan. Adapun untuk penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan, Surat izin Kapal Perikanan dan dokumen pendukungnya dilakukan di kantor pelayanan terpadu (PTSP), dapat dilihat pada table berikut:

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Sebagai negara maritim sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang berperan sangat penting didalam pembangunan Penangkapan ikan secara ilegal yang secara internasional dikenal dengan istilah illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing menurut definisi badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan pangan, FAO, merupakan segala bentuk aktivitas perikanan termasuk penangkapan ikan yang bertentangan dengan regulasi dan standar yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan sebuah negara). Pelaku IUU fishing sebagai akibatnya seringkali secara tidak adil memperoleh keuntungan tertentu yang tidak diperoleh oleh mereka yang beroperasi sesuai dengan regulasi dan standar tersebut. Illegal fishing, Unreported fishing, Unregulated fishing (IUU), Peningkatan Produksi 2 (dua) kali lipat, dan Sentra kawasan perikanan terpadu SKPT merupakan isu-isu penting dalam pembangunan perikanan. Isu selanjutnya yang saat ini berkembang adalah dengan dicanangkannya gerakan pengembalian kejayaan udang Windu oleh Gubernur Sulawesi Selatan

Dalam pelaksanaan rencana kerja yang disusun, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan berusaha memberikan penyuluhan bagi para nelayan yang akan melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan baik itu dikawasan perairan kabupaten Jeneponto maupun diperairan kabupaten lain agar supaya didalam melakukan aktifitas penangkapan ikan senantiasa dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau dengan tidak menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan, seperti bom ikan, pukat harimau (trawl) dan bius. Demikian pula halnya terhadap kegiatan budidaya, baik budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut, Dinas Kelautan dan Perikanan selalu berupaya agar kegiatan budidaya yang dilakukan selalu berpedoman pada cara Budidaya Ikan yang baik/benar (CBIB), sehingga mutu dan

kuantitas yang dihasilkan dapat memberikan nilai ekonomis bagi para pembudidaya

Adapun Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 adalah:

V i s i :

“JENEPONTO SMART 2023” (BerdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)

M i s i :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan
3. Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
4. Melaksanakan Pengembangan Wilayah Dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Merata
5. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah Dan Investasi Yang Berkeadilan
6. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan Dan Akuntabel Berbasis TIK
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya

Sejalan dengan Visi kepemimpinan Kabupaten Jeneponto, maka ditetapkan Visi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

” Menjadikan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sebagai Salah Satu Penggerak Utama Perekonomian Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto yang Sejahtera”.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan harus mempunyai misi yang jelas. Misi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan

3. Mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang memberikan nilai tambah terhadap kegiatan ekonomi lainnya
4. Meningkatkan SDM Kelautan dan Perikanan serta Sarana Prasarana

Penjelasan masing-masing Misi pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Jenepono dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan, membina dan memfasilitasi seluruh kepentingan nelayan dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- b. Mengendalikan (mengatur) terselenggaranya pemanfaatan sumberdaya ikan dan kelautan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- c. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha produktif serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan.
- d. Meningkatkan penyediaan bahan pangan sumber protein ikan sebagai bahan baku industri lokal serta perdagangan antar pulau.
- e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi dalam mengembangkan perikanan dan kelautan
- f. Meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan yang handal baik bagi aparat maupun nelayan.

Dampak pelayanan Dinas kelautan dan Perikanan serta peyelenggaraan Tugas dan fungsi terhadap Visi dan Misi Bupati, terhadap pencapaian program Regional/Nasional /Internasional/Kementrian atau lembaga adalah dengan menjalankan misi Dinas Kelautan dan Perikanan maka Misi Bupati yaitu Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah Dan Investasi Yang Berkeadilan dapat tercapai.

Tantangan dan Peluang yang dirasakan untuk meningkatkan Pelayanan SKPD adalah:

- a) Tantangan: kurangnya kesadaran masyarakat pesisir akan pentingnya dokumen izin usaha perikanan (IUP) dan dokumen izin tempat usaha perikanan (SITU),

sehingga masih banyak masyarakat yang bergerak pada bidang usaha perikanan, namun belum memiliki dokumen yang dimaksud. Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan masih harus terus berusaha secara maksimal untuk dapat memecahkan tantangan yang ada.

- b) Peluang: dengan adanya Struktur Organisasi perangkat daerah yang baru, maka dimungkinkan untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada dilapangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perikanan, dimana saat ini sudah terbentuk Bidang dan seksi pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang khusus menangani mengenai Kelembagaan Kelompok/Masyarakat perikanan dan Seksi yang khusus menangani kemitraan usaha perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian peningkatan produksi 2 (dua) kali lipat dalam pencapaiannya berusaha semaksimal mungkin untuk membantu para pelaku kegiatan disektor perikanan, diantaranya dengan melakukan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional, dari sektor penangkapan ikan, Dinas kelautan dan perikanan telah melakukan:

- a) Menyediakan sarana Perahu dan Mesin;
- b) Menyediakan sarana berupa alat tangkap;
- c) Menyediakan sarana berupa alat bantu penangkapan ikan dan alat keselamatan.

Pada sektor budidaya juga demikian, Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah melakukan upaya untuk meningkatkan produksi budidaya, baik itu budidaya air tawar, budidaya air payau dan budidaya laut. Kegiatan yang telah dilakukan berupa:

- a) Menyediakan Tali Temali Rumput Laut;
- b) Menyediakan Bibit Ikan Air Tawar beserta Pakan;
- c) Menyediakan Bibit udang Windu, beserta Pakan;
- d) Menyediakan sarana Prasarana budidaya rumput laut.

Sektor lain yang mendapat perhatian yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan produksi rumput laut, dimana Kabupaten Jeneponto adalah salah satu Kabupaten penghasil rumput laut didalam mendukung kegiatan tersebut dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto memberikan dukungan berupa sarana prasarana budidaya rumput laut seperti tali temali, dukungan sarana pengolahan pasca panen berupa alat penjemuran rumput laut.

Komoditi lain yang mendapat perhatian khusus pada tahun 2020 adalah komoditas garam, dimana untuk peningkatan produksi dan kualitas garam, maka pada tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengadopsi satu kegiatan/subkegiatan yang diperuntukkan untuk pengembangan Produksi dan kualitas garam

Dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat pula beberapa Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan rencana kerja yaitu :

- a. Keterbatasan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan keterbatasan aset dan akses terhadap sumberdaya untuk mengembangkan usaha.
- b. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil kelautan dan perikanan belum berperan secara optimal.
- c. Lambatnya proses transformasi teknologi ke nelayan dan pembudidaya ikan, hal ini berpengaruh terhadap penerapan teknologi di tingkat kelompok.

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selalu berupaya agar semua program kerja yang telah disusun sebelumnya dapat berjalan dengan baik. Utamanya dalam pelayanan terhadap masalah masalah yang dihadapi oleh nelayan, pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan. Dimana hal ini dianggap merupakan hal yang sangat penting karena program kerja yang telah disusun merupakan program-program yang pro rakyat, sehingga pencapaian visi dan misi kepala daerah dapat tercapai, utamanya memajukan

kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk pengembangan masyarakat pesisir maka Dinas Kelautan dan Perikanan selalu memberikan terobosan terobosan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pesisir, diantaranya adalah dengan meningkatkan kapasitas aparatur penyuluh dengan memberikan perlengkapan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk memberikan peluang kepada para nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan agar dapat lebih eksis dalam melakukan kegiatan usaha masing masing.

Dinas Kelautan dan Perikanan terus melakukan program-program dan kegiatan-kegiatan yang diasumsikan berperan penting dalam hal perkembangan perikanan dimasa yang akan datang, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang segala sesuatu yang dibutuhkan sudah tersedia dalam hal pengembangan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan juga terus melakukan inovasi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi garam dengan menggunakan teknologi Geomembran/Teknologi Ulir Filter (TUF). Disamping itu pula terus dilakukan upaya peningkatan produksi dan kualitas udang dengan menggunakan bibit udang jenis Vanamae, dimana udang jenis Vanamae ini lebih tahan penyakit dan masa panen yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan udang windu.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Program dan kegiatan dinas kelautan dan perikanan yang tercantum didalam RKPD setelah dilakukan identifikasi kebutuhan program dan kegiatan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan bersama, yakni adanya sinkronisasi antara program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Untuk penelaahan rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								7.872.487.888		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.780.387.888		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								42.000.000		
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Renja Yang disusun	tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	5.000.000	Pajak Rokok	

		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun	tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	8.000.000	Pajak Rokok	

		Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	8.000.000	Pajak Rokok	

		Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan	Jumlah dokumen DPA- SKPD	tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	8.000.000	Pajak Rokok	

		Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel	Kab. Jenepono, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	8.000.000	Pajak Rokok	

		Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000	Pajak Rokok	

		Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3.415.443.318		
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan ASN Yang dibayarkan	Tersedianya Laporan administrasi Keuangan Perangkat daerah sebagai pertanggung jawaban yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	12 Bulan	100 %	3.285.163.318	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	Tersedianya Laporan administrasi Keuangan Perangkat daerah sebagai pertanggung jawaban yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	5 Orang	100 %	125.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	Tersedianya Laporan administrasi Keuangan Perangkat daerah sebagai pertanggung jawaban yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Administrasi Umum Perangkat Daerah									97.944.570		
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Alat tulis Kantor Yang diadakan	terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jenepono, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	5 Jenis	100 %	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	3 Jenis	100 %	6.000.000	PENDAPATA ASLI DAERA (PAD)	

		Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan yang diadakan	terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	100 %	100 %	1.800.000	PENDAPATA ASLI DAERA (PAD)	

		Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase	Jumlah Kunjungan Tamu	terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	12 Bulan	100 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase	Jumlah rata-rata perjalanan dinas dalam dan luar daerah	terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	12 Bulan	100 %	65.144.570	Pajak Rokok	

		Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									140.000.000		
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Rekening Listrik yang dibayarkan	terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	12 Bulan	100 %	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan Kantor	terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	14 Orang	100 %	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									85.000.000		
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	tersedianya kendaraan dinas operasional yang laik jalan dalam menunjang operasional perkantoran	Kab. Jenepono, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	10 Unit	100 %	85.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									2.356.000.000		
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota									551.000.000		
02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persentase Produksi Perikanan Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	Jumlah Kelompok Penerima bantuan Prasarana Penangkapan	meningkatnya Kapasitas dan taraf ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan	Kab. Jenepono, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 100 % 20 %	50 Kelompo	k10 %	551.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota									1.800.000.000		

01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persentase Produksi Perikanan Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina	meningkatnya Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 100 % 20 %	50 Kelompo	k10 persen	1.800.000.000	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Fisik
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)									5.000.000	
02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persentase Produksi Perikanan Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	Jumlah Bulan pemenuhan Operasional	Beroperasinya TPI dalam mendukung kegiatan Nelayan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	20 % 100 % 20 %	12 Bulan	100 %	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									1.701.100.000	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil									800.000.000	

01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Persentase Produksi Budidaya Persentase Produksi Garam Bahan Baku Industri Persentase Produksi Garam Konsumsi	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang di bina	meningkatnya Kapasitas serta taraf ekonomi Kelompok Pembudidaya dan Kelompok Usaha Garam Rakyat	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 100 % 2 % 98 %	35 Kelompo	k10 %	800.000.000	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Fisik
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan									901.100.000	
01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Persentase Produksi Budidaya Persentase Produksi Garam Bahan Baku Industri Persentase Produksi Garam Konsumsi	Jumlah data statistik Perikanan	meningkatnya Kapasitas Kelompok Pembudidaya	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	20 % 100 % 2 % 98 %	1 Dokumen	10 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Persentase Produksi Budidaya Persentase Produksi Garam Bahan Baku Industri Persentase Produksi Garam Konsumsi	Jumlah Kelompok Penerima bantuan Prasarana Budidaya	meningkatkan Kapasitas Kelompok Pembudidaya	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 100 % 2 % 98 %	35 Kelompo	k10 %	891.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									5.000.000	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota									5.000.000	
02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase Produksi Budidaya	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan	terciptanya cara budidaya ikan yang baik	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Kali	100 %	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									30.000.000	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil									30.000.000	

01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cakupan Bina Kelompok Pengolah Hasil Perikanan Persentase Produksi Perikanan	Jumlah Kelompok yang dibina	meningkatnya Produktifitas dan keragaman hasil olahan Produk perikanan	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 % 100 %	1 Kelompok	2 %	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
									7.872.487.888		

Pada rancangan RKPD diatas dapat dilihat bahwa struktur program, kegiatan, subkegiatan dan postur anggaran sudah sangat mendukung upaya dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati, hal ini dapat dilihat dengan besarnya jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan yang pro Masyarakat dibandingkan dengan anggaran rutin yang digunakan dalam melakukan operasional selama tahun 2022

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh dinas kelautan dan perikanan merupakan hasil penjarangan dari usulan-usulan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang yang dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan dan di tingkat kecamatan, adapun kegiatan yang menjadi usulan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	LOKASI	JUMLAH
Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar	Desa Tompobulu	6 Lokasi
Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar	Desa Bontotiro	1 Paket
pengadaan bibit ikan air tawar	desa	70000 Ekor
Pengadaan bibit ikan air tawar	Desa	100000 Ekor
Pengadaan bibit Ikan air tawar	Desa Pallantikang	30 Ekor
Pengadaan Bibit Ikan Bandeng	Kelurahan Pallengu	10000 Ekor
Pengadaan Ikan Air Tawar	Lebang Manai Utara	18 Ekor
Pengadaan ikan air tawar	Desa Kassi	1 Titik
Bantuan Budi Daya Ikan Air Tawar	Desa Marayoka	1 Kelompok
Pembinaan Perbenihan Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	5 Kelompok
Pembinaan Pengelolaan Ikan Air Tawar	Desa Tompobulu	1 Lokasi
Pembinaan Pengelolaan Ikan Air Tawar	Desa Bontotiro	1 Paket
Pembinaan Pengelolaan Ikan Air Tawar	Lebang Manai Utara	6 Unit
pembinaan pengelolaan ikan air tawar	Desa Kassi	1 Titik
Bantuan Tali Rumput Laut	Lingkungan Maricaya	3 Kelompok
Pengadaan Para-Para Jemur Rumput Laut	Bungung-Bungung, Kampo, Kalumapang Barat 2	3 Lokasi
Pengadaan Perahu Rumput Laut	Desa Borongtala	100 Unit
Pengadaan Tempat Penjemuran Rumput Laut	Dusun Ujung Batu, Kassika, Bontobaddo	3 Unit

Pengadaan Kebun bibit rumput laut	Kalumpang Barat I	1 Kelompok
Pengadaan Bantuan Pembudidaya Rumput Laut	3 Dusun di Desa ARPAL	3 Lokasi
Pembangunan lantai jemur rumput laut dan pengadaan gerobak	Desa Kampala	5 Unit
Pembangunan lantai jemur rumput laut dan pengadaan gerobak Dusun Kalukuang	Desa Kampala	5 Unit
Bantuan Tali Rumput Laut	Lingkungan Maricaya	3 Kelompok
Pengadaan Tali Temali untuk Rumput laut	Kelurahan Pallengu	400 Kg
Pengadaan Tali Temali Budidaya rumput laut	Tersebar	2000 Kg
Perbaikan saluran dan pematang tambak	Tamanroya Selatan, Tamanroya Ujung Tanah	500 Meter
Pengadaan Kolam Ikan	Semua Dusun	5 Titik
Pengadaan Jaring 5 Inch	Kampo, Bungung-Bungung dan Kassibambung	200 Paket
Penyediaan alat tangkap ikan bagi Nelayan satu set (Perahu, mesin, dan jaring)	Tamanroya selatan dan tamanroya Ujung tanah	10 Kelompok
Pengadaan Perahu/Kapal dan Peraltannya Lingk. Pallengu	KEL PALLENGU	5 Unit
Pengadaan Perahu	Desa ARPAL	20 Unit
Pengadaan Mesin Perahu	Desa ARPAL	20 Unit
Bantuan Perahu Nelayan	Lingkungan Maricaya	3 Kelompok
Pengadaan perahu	Dusun Bungung Pandang	10 Unit
Pengadaan Perahu Nelayan	Kel. Pallengu	1 Unit
Pembangunan Jalan Nelayan	Kel. Bontorannu	100 Meter
Bantuan Alat Tangkap Nelayan	Dusun Pandang-Pandang	20 Paket
bantuan alat tangkap ikan	5 lingkungan di pantai bahari	100 Kelompok
Pembangunan Bila-bila Penangkap Ikan Para Nelayan	Garassikang	500 Meter

Pembangunan Bila-bila Penangkap Ikan Para Nelayan	Garassikang	500 Meter
Pembangunan Bagang-bagang	Garassikang	10 Buah
Pengadaan Saprodi Perikanan	Kel.Bontorannu Jelas	5 Kelompok
Pengadaan Mesin Pompanisasi untuk Petani garam	4 Dusun	20 Unit
Pengadaan Kincir Angin	Desa Boronglamu	20 Unit
pengorokan saluran air penggaraman	kalerungan kelurahan pantai bahari	500 Meter

B. Program dan Kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan (DPRD) sebagai Pokok-Pokok pikiran, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Usulan	Alamat	Koefisien	Pagu fiks
Pengadaan Perahu Beserta Mesin	bontosunggu, Kab. Jeneponto, Tamalatea, Tamalatea, Seluruh Kelurahan/Desa	10 unit	100.000.000
Pengadaan Tali-Temali	Tobereka, Kab. Jeneponto, Tamalatea, Borongtala	1 Kelompok	50.000.000
Pengadaan Perahu	pannara, kampung baru, Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang Selatan	2 Kelompok	80.000.000
Pengadaan Tali-Temali	pannara, Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang Selatan	2 Kelompok	50.000.000
Pengadaan Perahu Beserta Mesin	Dusun Bungung-Bungung, Kab. Jeneponto, Tamalatea, Bontosunggu	1 Unit	100.000.000
Pengadaan Perahu Beserta Mesin	Lingk. Ora" Orasa", Kab. Jeneponto, Tamalatea, Tonro Kassi	1 Unit	25.000.000
Pengadaan Tali-Temali	Lingk. bontang, Kab. Jeneponto, Binamu, Empoang Selatan	1 Klp	10.000.000

Pengadaan Tali-Temali	Lingk. tamarunang timur, Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	1 Klp	10.000.000
Pengadaan Perahu Beserta Mesin	Arungkeke Pallantikang, Kab. Jeneponto, Arungkeke, Arungkeke Pallantikang	2 Unit	46.000.000
Pengadaan Tali-Temali	ARPAL, Kab. Jeneponto, Arungkeke, Arungkeke Pallantikang	3 Kelompok	100.000.000
Pengadaan Tali-Temali	Pabiringa, Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	2 Kelompok	21.100.000
Pengadaan Perahu	Tarowang, Kab. Jeneponto, Tarowang, Tarowang	2 Buah	30.000.000
Pembangunan Jalan Tambak	Pacce"langa, Kab. Jeneponto, Bangkala, Pallengu	300 Meter	115.000.000
Pengadaan Mesin Perahu	Bulo-bulo, Kab. Jeneponto, Arungkeke, Bulo Bulo	5 unit	50.000.000
Pengadaan Perahu	Pattontongan, Kab. Jeneponto, Binamu, Biring Kassi	2 Kelompok	50.000.000
Pengadaan Tali-Temali	Biringkassi, Kab. Jeneponto, Binamu, Biring Kassi	4 Kelompok	50.000.000
Pengadaan Tali-Temali	Pabiringa, Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	2 Kelompok	50.000.000
Pengadaan Tali-Temali	Desa Mallasoro, Kab. Jeneponto, Bangkala, Mallasoro	200 kg	50.000.000

Pengadaan Tali-Temali	Desa Punagaya, Kab. Jeneponto, Bangkala, Punagaya	100 kg	25.000.000
Pengadaan Tali-Temali	Kelurahan Pantai Bahari, Kab. Jeneponto, Bangkala, Pantai Bahari	50 kg	15.000.000
Pengadaan Jaring Penangkap Ikan	Kelurahan Pantai Bahari, Kab. Jeneponto, Bangkala, Pantai Bahari	20 set	20.000.000
Pengadaan Perahu	Palajau, Kab. Jeneponto, Palajau	2 Unit	12.500.000
Pengadaan Perahu	Arungkeke, Kab. Jeneponto, Arungkeke	1 Unit	12.500.000
Pengadaan Perahu	Pao, Kab. Jeneponto, Pao	1 Unit	12.500.000
Pengadaan Perahu	Tino, Kab. Jeneponto, Tarowang, Tino	1 Unit	12.500.000
Pengadaan Tali-Temali	Bulo Bulo, Kab. Jeneponto, Arungkeke, Bulo Bulo	1 Klp	12.500.000
Pengadaan Tali-Temali	Palajau, Kab. Jeneponto, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Klp	12.500.000
Pengadaan Tali-Temali	Arungkeke, Kab. Jeneponto, Arungkeke, Arungkeke	1 Klp	12.500.000
Pengadaan Tali-Temali	Tino, Kab. Jeneponto, Tarowang, Tino	1 Klp	12.500.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan diarahkan kepada terwujudnya Kondisi Kelautan dan Perikanan yang lestari untuk menjamin ketersediaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir secara arif untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Kementerian Kelautan sangat memperhatikan keberlanjutan (Sustainability) dari sumberdaya alam bidang perikanan. IUU (illegal, unregulated, unreported) fishing adalah merupakan contoh konkret dari kebijakan nasional yang saat ini diberlakukan oleh Pemerintah. Penerapan IUU IUU (illegal, unregulated, unreported) fishing selanjutnya diatur oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 dan 2 Tahun 2016. Dimana kedua Permen ini menitik beratkan kepada keberlanjutan suatu jenis ekosistem, sehingga dengan adanya keberlanjutan suatu ekosistem sumberdaya alam, maka diharapkan hal ini akan memberikan jaminan kepada masyarakat pesisir untuk terus menerus mengeksploitasi sumberdaya alam secara arif dan bijaksana, sehingga keberlanjutan dan usaha bagi para masyarakat pesisir dapat berlangsung secara terus menerus, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya keberlanjutan usaha, maka secara tidak langsung pengentasan kemiskinan bagi warga pesisir dapat teratasi.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berlandaskan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Sejalan dengan hal tersebut diatas perlu adanya upaya:

- a. Perbaiki produktifitas nasional melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan pertumbuhan ekonomi;
- b. Penciptaan lapangan kerja formal yang melindungi masyarakat serta dilaksanakan berbasis hubungan industrial yang setara antara pekerja dan pengusaha;
- c. Perlindungan bagi nelayan, sebagai bagian dari perlindungan sosial, diberikan tidak hanya bagi pekerja formal namun juga pekerja informal;
- d. Perbaiki regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung dunia usaha.

Dukungan dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung kebijakan Nasional, khusus dibidang kelautan dan Perikanan, dapat dilihat dari Program Gubernur Sulawesi Selatan, diantaranya dengan adanya penancangan Program gerakan dua kali lipat, maksud dan tujuan dari program ini adalah meningkatkan semua jenis komoditi perikanan menjadi dua kali lipat, baik dari sektor penangkapan, budidaya, maupun pengolahan hasil perikanan. Dukungan konkret yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

- a) Untuk mendukung sektor perikanan tangkap di Kabupaten Jeneponto, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan berupa Perahu penangkap ikan yang dilengkapi dengan alat tangkap, guna mendukung kegiatan Nelayan sehari-hari, diharapkan dengan adanya kegiatan operasional nelayan secara berkesinambungan, maka produktifitas Nelayan akan meningkat. Peningkatan produktifitas nelayan dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing nelayan
- b) Untuk mendukung sektor perikanan Budidaya di Kabupaten Jeneponto, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan berupa sarana prasarana budidaya laut, berupa: tali temali, bibit rumput laut. Hal ini juga dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi

budidaya laut khususnya budidaya rumput laut. Peningkatan produktifitas pembudidaya dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing pembudidaya rumput laut. Demikian pula pada kegiatan budidaya air payau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan dukungan berupa bibit udang dan pakan beserta sarana prasarana produksi udang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja. Tujuan yang ingin dicapai pada rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 yaitu:

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Dalam upaya pencapaian tujuan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto tahun 2021, terdapat sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 adalah:

1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap sebesar 3%
2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 5%

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto.

Secara konseptual, Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta proaktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu organisasi. Visi disamping sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi, juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana termaktub didalam RPJPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 adalah ” Jeneponto Yang Maju, Tangguh, Bermartabat dengan Bernafaskan Keagamaan ”.

Adapun Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 adalah:

V i s i :

“JENEPONTO SMART 2023” (BerdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)

M i s i :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan
3. Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
4. Melaksanakan Pengembangan Wilayah Dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Merata
5. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah Dan Investasi Yang Berkeadilan
6. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan Dan Akuntabel Berbasis TIK
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya

Sejalan dengan Visi kepemimpinan Kabupaten Jeneponto, maka ditetapkan Visi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

- ” Menjadikan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sebagai Salah Satu Penggerak Utama Perekonomian Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto yang Sejahtera”.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan harus mempunyai misi yang jelas. Misi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
7. Mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang memberikan nilai tambah terhadap kegiatan ekonomi lainnya
8. Meningkatkan SDM Kelautan dan Perikanan serta Sarana Prasarana

Penjelasan masing-masing Misi pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Jenepono dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan, membina dan memfasilitasi seluruh kepentingan nelayan ikan dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- b. Mengendalikan (mengatur) terselenggaranya pemanfaatan sumberdaya ikan dan kelautan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- c. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha produktif serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan.
- d. Meningkatkan penyediaan bahan pangan sumber protein ikan sebagai bahan baku industri lokal serta perdagangan antar pulau.
- e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi dalam mengembangkan perikanan dan kelautan
- f. Meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan yang handal baik bagi aparat maupun nelayan.

3.3. Program dan kegiatan

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan diarahkan kepada terwujudnya Kondisi Kelautan dan Perikanan yang lestari untuk menjamin ketersediaan

sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir secara arif untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka menunjang pencapaian Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan maka ditetapkan program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								7.872.487.888				8.083.728.862	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.780.387.888				3.976.628.862	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								42.000.000				60.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Renja Yang disusun	tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	5.000.000	Pajak Rokok		Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan	100 % 100 % 100 %	10.000.000

										Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun	tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	8.000.000	Pajak Rokok	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 % 100 % 100 %	10.000.000

										Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	tersedianya Dokumen Perencanaa n dan Penganggar an yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	8.000.000	Pajak Rokok	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggara an Penunjang Urusan Pemerintahan	100 % 100 % 100 %	10.000.000

										Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen DPA- SKPD	tersedianya Dokumen Perencanaa n dan Penganggar an yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	8.000.000	Pajak Rokok	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggara an Penunjang Urusan Pemerintahan	100 % 100 % 100 %	10.000.000

										Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	8.000.000	Pajak Rokok	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggara an Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana	100 % 100 % 100 %	10.000.000

										Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000	Pajak Rokok	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana	100 % 100 % 100 %	10.000.000

										Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.415.443.318				3.456.311.468
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan ASN Yang dibayarkan	Tersedianya Laporan administrasi Keuangan Perangkat daerah sebagai pertanggung jawaban yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	12 Bulan	100 %	3.285.163.318	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	3.321.031.468

										Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	Tersedianya Laporan administrasi Keuangan Perangkat daerah sebagai pertanggung jawaban yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	5 Orang	100 %	125.280.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana	100 % 100 % 100 %	125.280.000

										Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	Tersedianya Laporan administrasi Keuangan Perangkat daerah sebagai pertanggung jawaban yang akuntabel	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana	100 % 100 % 100 %	10.000.000

										Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Administrasi Umum Perangkat Daerah								97.944.570				180.317.394
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Alat tulis Kantor Yang diadakan	terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	5 Jenis	100 %	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	30.000.000

										Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	3 Jenis	100 %	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana	100 % 100 % 100 %	8.400.000

										Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan yang diadakan	terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	100 %	100 %	1.800.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana	100 % 100 % 100 %	3.600.000

										Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kunjungan Tamu	terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	12 Bulan	100 %	10.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana	100 % 100 % 100 %	20.000.000

										Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rata-rata perjalanan dinas dalam dan luar daerah	terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	12 Bulan	100 %	65.144.570	Pajak Rokok	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana	100 % 100 % 100 %	118.317.394

										Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								140.000.000				160.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Rekening Listrik yang dibayarkan	terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	12 Bulan	100 %	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	60.000.000

										Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan Kantor	terlaksananya administrasi umum Perangkat daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	14 Orang	100 %	80.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana	100 % 100 % 100 %	100.000.000

										Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								85.000.000				120.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	tersedianya kendaraan dinas operasional yang laik jalan dalam menunjang operasional perkantoran	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	100 % 100 % 100 %	10 Unit	100 %	85.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	120.000.000

											Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								2.356.000.000					2.361.000.000
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								551.000.000					551.000.000
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persentase Produksi Perikanan Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	Jumlah Kelompok Penerima bantuan Prasarana Penangkapan	meningkatkan Kapasitas dan taraf ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan	Kab. Jenepono, Semua Kecamatan, Kelurahan	20 % 100 % 20 %	50 Kelompok	k10 %	551.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persentase Produksi Perikanan Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	20 % 100 % 20 %	551.000.000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								1.800.000.000					1.800.000.000
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persentase Produksi Perikanan Persentase Produksi	Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina	meningkatkan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama	Kab. Jenepono, Semua Kecamatan, Kelurahan	20 % 100 % 20 %	50 Kelompok	k10 persen	1.800.000.000	Dana Transfer Khusus – Dana		Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persentase Produksi Perikanan	20 % 100 % 20 %	1.800.000.000

	perikanan kelompok nelayan		(KUB) Nelayan						Alokasi Khusus Fisik		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan		
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								5.000.000					10.000.000
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persentase Produksi Perikanan Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	Jumlah Bulan pemenuhan Operasional	Beroperasinya TPI dalam mendukung kegiatan Nelayan	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	20 % 100 % 20 %	12 Bulan	100 %	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persentase Produksi Perikanan Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	20 % 100 % 20 %	10.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								1.701.100.000					1.711.100.000
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								800.000.000					800.000.000
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Persentase Produksi Budidaya Persentase Produksi Garam Bahan Baku Industri Persentase Produksi Garam Konsumsi	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang di bina	meningkatkan Kapasitas serta taraf ekonomi Kelompok Pembudidaya dan Kelompok Usaha	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 100 % 2 % 98 %	35 Kelompo	k10 %	800.000.000	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Fisik		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Persentase Produksi Budidaya Persentase Produksi Garam Bahan Baku Industri Persentase	20 % 100 % 2 % 98 %	800.000.000

			Garam Rakyat								Produksi Garam Konsumsi		
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								901.100.000					911.100.000
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Persentase Produksi Budidaya Persentase Produksi Garam Bahan Baku Industri Persentase Produksi Garam Konsumsi	Jumlah data statistik Perikanan	meningkatkannya Kapasitas Kelompok Pembudidaya	Kab. Jeneponto, Binamu, Pabiringa	20 % 100 % 2 % 98 %	1 Dokumen	10 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Persentase Produksi Budidaya Persentase Produksi Garam Bahan Baku Industri Persentase Produksi Garam Konsumsi	20 % 100 % 2 % 98 %	15.000.000	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Persentase Produksi Budidaya Persentase Produksi Garam Bahan Baku Industri Persentase Produksi Garam Konsumsi	Jumlah Kelompok Penerima bantuan Prasarana Budidaya	meningkatkannya Kapasitas Kelompok Pembudidaya	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 100 % 2 % 98 %	35 Kelompok	10 %	891.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Persentase Produksi Budidaya Persentase Produksi Garam Bahan	20 % 100 % 2 % 98 %	896.100.000	

									-Dan Alokasi Umum		Baku Industri Persentase Produksi Garam Konsumsi		
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								5.000.000					5.000.000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								5.000.000					5.000.000
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase Produksi Budidaya	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan	terciptanya cara budidaya ikan yang baik	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Kali	100 %	5.000.000	PENDA PATA ASLI DAERA (PAD) Pajak Rokok		Persentase Produksi Budidaya	100 %	5.000.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								30.000.000					30.000.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								30.000.000					30.000.000

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cakupan Bina Kelompok Pengolah Hasil Perikanan Persentase Produksi Perikanan	Jumlah Kelompok yang dibina	meningkatnya Produktifitas dan keragaman hasil olahan Produk perikanan	Kab. Jenepono, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 % 100 %	1 Kelompok	2 %	30.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Bina Kelompok Pengolah Hasil Perikanan Persentase Produksi Perikanan	6 % 100 %	30.000.000
								7.872.487.888				8.083.728.862

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja Tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023. Rencana Kerja ini memuat Program-program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2022 dan Rencana Kerja ini diharapkan berperan sebagai rujukan dalam menuntun pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan begitu pula

Hal - hal yang dianggap penting untuk mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 adalah:

- a) Peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan (perahu jukung) dan alat tangkap ikan (jaring/pancing rawai/bubu)
- b) Peningkatan sarana prasarana Budidaya Perikanan, baik budidaya laut (rumput laut) dan budidaya air payau (Ikan dan udang) serta Budidaya air tawar (Nila

Rencana Kerja ini diharapkan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara sistematis sehingga produktifitas dan efisiensi anggaran dapat memadai.